

PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT BATUDAA PANTAI KABUPATEN GORONTALO

Zulkifli Vebriadi Saleh^{1(a)}, Lida Van Gobel^{2(b)}, Yahya Antu^{3(c)}

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

^{a)}zulkifly,saleh@gmail.com, ^{b)}lisdavangobel69@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

31-01-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

Pemanfaatan Aset Daerah,
Pelayanan Publik, Kantor
Camat

Keywords:

Regional Asset Utilization,
Public Service, Camat Office

Corresponding Author:

zulkifly,saleh@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.605>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Aset Daerah dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kantor Camat Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Dengan sub fokus penelitian yaitu koordinasi, pemeliharaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil penelitian tentang Pemanfaatan Aset Daerah dalam Menunjang Pelayanan Publik yang dilihat dari aspek koordinasi, pemeliharaan, dan pengawasan masih kurang atau belum efektif dilakukan dalam menunjang pelayanan publik di Kantor Camat Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yakni perlunya temuan masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini seperti koordinasi yang kurang, pemeliharaan aset yang kurang, dan pengawasan yang kurang efektif dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau rekomendasi untuk perbaikan pemanfaatan aset dalam meningkatkan pelayanan publik.

ABSTRACT

This study aims to determine the Utilization of Regional Assets in Supporting Public Services at the Batudaa Pantai Sub-District Office, Gorontalo Regency. With sub-focus research namely coordination, maintenance, and supervision. This research uses descriptive qualitative research. The data collection techniques used are: Observation techniques, interviews and recording secondary data. In accordance with the type of research used, the data analysis technique used is qualitative analysis technique. The results showed that, the results of research on the Utilization of Regional Assets in Supporting Public Services seen from the aspects of coordination, maintenance, and supervision are still lacking or not effectively carried out in supporting public services at the Batudaa Pantai Sub-District Office, Gorontalo Regency. The things suggested in this study are the need for the findings of the problems identified in this study such as lack of coordination, lack of asset maintenance, and ineffective supervision can be used as benchmarks or recommendations for improving asset utilization in improving public services.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo memiliki potensi di berbagai sektor dan untuk menunjang optimalisasi potensi daerah yang ada dan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kecamatan di dukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang merupakan aktiva tetap (*fixed asset*) yang dimiliki pemerintah kecamatan tersebut diklasifikasikan berupa : mobil dinas, motor dinas, computer, tanah, jalan dan jembatan, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, alat pertanian, dan alat kantor lainnya, semuanya itu adalah untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa asset-aset daerah yang ada Kecamatan Batudaa Pantai belum optimal dimanfaatkan dalam menunjang pelayanan publik. Kondisi ini terjadi karena koordinasi antara aparat di Kantor Camat masih kurang dalam pemanfaatan asset, demikian juga koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten serta pemerintah desa masih jarang dilakukan. Misalnya dalam pemanfaatan gedung puskesmas pembantu atau polindes yang ada di setiap desa belum efektif dimanfaatkan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Dimana polindes yang seharusnya menjadi tempat pelayanan kesehatan masyarakat, namun yang terjadi selama ini bangunan tersebut tidak dimanfaatkan, karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada pemerintah kabupaten dalam menempatkan petugas kesehatan untuk melayani masyarakat.

Pemeliharaan asset daerah yang ada di kecamatan batudaa pantai belum optimal, seperti asset jalan, akses jalan ke kantor kecamatan yang dilalui oleh masyarakat yang kondisinya rusak parah, sangat terjal atau mendaki dengan melewati gunung belum diperbaiki, sehingga hal ini seringkali menghambat masyarakat maupun aparat dalam pelayanan publik di kecamatan batudaa pantai. Demikian pula dengan asset mesin genset atau generator yang selama ini dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan, hasil jasa pinjaman tersebut untuk pemeliharaan mesin genset, yang kadang-kadang jasanya tersebut tidak cukup untuk biaya pemeliharaan.

Pengawasan pemanfaatan asset daerah dalam pelayanan publik belum efektif

dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari sekian banyak barang-barang atau asset yang ada di Kantor Camat Batudaa Pantai seperti mobil dinas, motor dinas, computer dan bangunan puskemas dan polindes, jalan kurang terawat dengan baik, dan sebagian besar sudah rusak dan sampai hari ini belum diperbaiki. Kondisi ini terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap asset daerah sekaligus dalam pemanfaatannya belum maksimal dilakukan.

Dari masalah tersebut di atas sangat mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian ilmiah dengan menetapkan judul tentang "Pemanfaatan Aset Daerah dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo".

Kontz dan O'Donnel (dalam Manullang (2013:16) "manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasi, penempatan, penggerakan dan pengendalian. Kemudian Follet (dalam Handoko, 2014:3) memberikan pengertian bahwa "manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain".

Manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha memanfaatkan segenap sumber daya yang ada. Manajemen mempunyai tujuan tertentu, keberhasilan tujuan tersebut tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan (masyarakat/publik), Pemerintah harus menyiapkan aparat yang mempunyai kemampuan dalam melayani, memenuhi kebutuhan, menanggapi keluhan masyarakat secara memuaskan, dengan penyediaan fasilitas kerja yang memadai guna memuaskan pelanggan atau masyarakat/publik. Masyarakat dalam era globalisasi dan abad 21 (abad informasi) yang didukung oleh teknologi moderen terutama di bidang transportasi, telekomunikasi, membuat mobilitas dan aktivitas masyarakat semakin meningkat dengan cepat, menuntut pelayanan yang semakin cepat dan tepat. Dalam praktek administrasi negara di Indonesia, dikenal dua dimensi tugas pemerintahan, yaitu tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas

umum pemerintahan inilah sebagai titik tolak manajemen pelayanan masyarakat.

Sianipar (2014:5), mendefinisikan pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Artinya obyek yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi (seseorang), dan organisasi (sekelompok anggota organisasi).

Pengertian pelayanan yang dikemukakan di atas, terkandung suatu kondisi yang melayani, yakni memiliki suatu keterampilan, keahlian di bidang tertentu. Dengan keterampilan dan keahlian tersebut pihak yang melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan tertentu, sehingga mampu memberikan bantuan dalam menyelesaikan suatu keperluan, kebutuhan individu atau organisasi. Oleh karena itu pada hakekat pelayanan umum yang prima menurut Moenir (2013:27), adalah pelayanan umum yang (a) meningkatkan mutu produksi dan produktivitas di bidang pelayanan, (b) mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, dan (c) mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat luas. Pelayanan umum yang prima harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang terpadu dan bersifat : sederhana, terbuka, lancar, cepat, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.

Istilah pelayanan umum di Indonesia seringkali diidentikkan dengan pelayanan publik sebagai terjemahan dari public service. Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali digunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan. Sedangkan menurut AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2015:141) Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat.

Pelayanan publik Menurut (Sinambela 2014: 5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak

terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Moenir (2015: 26) Bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Manajemen Aset Daerah Menurut Siregar (2014:61), Manajemen aset daerah dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 dinyatakan sebagai rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penata usahannya. Dengan persebaran aset secara geografis serta penanganan masing-masing aset spesifik (misalkan diakibatkan oleh perbedaan dalam hal pemanfaatan, peruntukan yang beragam, serta pola/model pengguna usaha aset kepada pihak

ketiga yang beragam pula), maka peneglolaan aset mesti dilakukan dalam suatu program yang dapat dipertanggung jawabkan. Program ini meski menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang dalam wacana demokrasi saat ini disebut sebagai good corporate governance, dengan mengacu pada asas-asas keterbukaan (*transperancy*), serta tidak mengorbankan kepentingan publik (*public server*).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Penelitian tentang Pemanfaatan Aset Daerah dalam Menunjang Pelayanan Publik Di Kantor Camat Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo ini, menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2018:3), sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati. Demikian pula menurut Sugiyono (2020 :11), penelitian jenis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik

satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Pendekatan kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2018:3), adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Fokus penelitian tentang Pemanfaatan Aset Daerah dalam Menunjang Pelayanan Publik Di Kantor Camat Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo yang dikonsepsikan sebagai aktivitas atau proses yang dilakukan dengan mempertimbangkan koordinasi, pemeliharaan, dan pengawasan. Observasi dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2015:267), merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat – baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) – aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2015:267), “Peneliti melakukan *face to face interview* (berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam dilakukan tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas guna menggali lebih dalam tentang masalah penelitian”. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh landasan penulisan ilmiah yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan di Pegawai adalah pelaksana pekerjaan pada suatu organisasi. Dengan adanya pegawai maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan baik. Kantor Camat Batudaa Pantai sebagai lokasi penelitian memiliki latar belakang responden yang berbeda seperti umur, pendidikan, jenis kelamin. Identitas responden dapat dilihat pada tabel 1. Berikut:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kantor Camat Batudaa Pantai

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	9	47,36
2	Perempuan	10	52,63
	Jumlah	19	100

Sumber: Kantor Camat Batudaa Pantai, 2022

Dari tabel 1. di atas menunjukkan bahwa dari 19 pegawai menurut jenis kelamin yang dominan adalah perempuan dengan jumlah 10 orang atau 52,63% dan responden laki-laki sebanyak 9 orang atau 47,36%. Dari tabel di atas nampak bahwa jenis kelamin sangat menentukan pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Pegawai yang berjenis kelamin perempuan lebih rapi dalam bekerja dan laki-laki lebih cekatan dan cepat dalam bekerja.

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Kantor Camat Batudaa Pantai

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA Sederajat	9	47,36
3	Akademi/Diploma	2	10,52
4	Sarjana (S1)	7	36,84
5	Pascasarjana (S2)	1	5,26
	Jumlah	19	100

Sumber : Kantor Camat Batudaa Pantai Tahun, 2022

Dari tabel 2. mengenai distribusi pegawai berdasarkan pendidikan dapat diketahui bahwa dari 19 responden didominasi oleh SLTA berjumlah 9 orang atau 47,36 %, berpendidikan Akademi/Diploma berjumlah 2 orang atau 10,52%, berpendidikan Sarjana 7 orang atau 36,84%, dan yang berpendidikan Pascasarjana 1 orang atau 5,26%.

Tabel 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Umur di Kantor Camat Batudaa Pantai

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20 – 25	3	15,78
2	26 – 30	5	26,31
3	31 – 35	4	21,05
4	36 – 40	4	21,05
5	41 – 50	3	15,78
	Jumlah	19	100

Sumber: Kantor Camat Batudaa Pantai Tahun, 2022

Dari tabel 3. tersebut di atas tentang distribusi pegawai berdasarkan umur dapat diketahui bahwa dari 19 responden umur tertinggi yaitu responden yang berumur 26 – 30 tahun sebesar 26,31%. Responden pada usia 20 – 25 daya kerja dan kreasi serta inovasi sangat tinggi sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan masa usia ini lebih menonjol di bandingkan dengan pegawai di atas usia ini. Selain pegawai usia 31 – 35 adalah masa-masa penuh gairah dalam bekerja. Pegawai di masa usia ini berusaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik meskipun setiap pekerjaan yang dikerjakan mempunyai tantangan.

Tabel 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di Kantor Camat Batudaa Pantai

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pembina IV / a	1	5,26
2.	Penata III / c	4	21,05
3.	Penata Muda III / a	2	10,52
4.	Penata Tingkat 1 III / d	3	15,78
5.	Pengatur II / c	3	15,78
6.	Pengatur Muda Tkt I III/ b	1	5,26
7.	Penata Tingkat 1 III /b	5	26,31
Jumlah		19	100

Sumber : Kantor Camat Batudaa Pantai Tahun, 2022

Dari tabel 4. tersebut di atas tentang distribusi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan menunjukkan bahwa dari 19 responden pegawai yang paling banyak memiliki pangkat dan golongan III/b yaitu 5 orang atau 26,31% dan pegawai yang memiliki pangkat / golongan IV/a adalah 1 orang atau 5,26%. Pegawai yang ada di Kantor Camat Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo di Dominasi oleh pegawai yang memiliki pangkat / golongan III/b.

Tabel 5. Keadaan Aset Daerah di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

No.	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
A	Aset tidak bergerak	Buah/unit/bidang	Baik/rusak
1	Tanah	1 bidang	Keadaan baik
2	Bangunan	1 buah	Keadaan baik
3	Instalasi dan Jaringan	2 unit	Keadaan baik
4	Puskesmas/Polindes	5 buah	Rusak satu buah
5	Mesin generator	1 buah	Rusak
6	Jalan	3 km	Kondisi rusak
7	Komputer/print	3 unit	Rusak satu
B	Aset bergerak	-	-
1	Mobil	1 buah	Keadaan baik
2	Motor	9 buah	Rusak satu
Jumlah		20 buah/unit	

Sumber: Kantor Camat Batudaa Pantai, 2022

Dari tabel 5. tersebut di atas mengenai keadaan aset daerah di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, menunjukkan bahwa terdapat 20 buah/unit/bidang aset daerah yang dimanfaatkan.

Uraikan data hasil penelitian berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan penelitian, terkait dengan sub-sub fokus yang digunakan untuk mengamati obyek penelitian ini yaitu Pemanfaatan Aset Daerah dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Adapun sub fokus yang digunakan yakni: koodinasi, pemeliharaan, dan pengawasan. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, diuraikan masing-masing sub fokus penelitian sebagai berikut

Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fokus yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Koordinasi merupakan komunikasi dan singronisasi antara aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa serta masyarakat dalam pemanfaatan aset daerah. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Koordinasi mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Menurut Terry (dalam Hasibuan 2016:85) menyatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Selain itu Manullang (2014: 72) mengatakan bahwa koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah dalam menunjang pelayanan publik yang dilihat dari aspek koordinasi masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan gedung puskesmas pembantu atau polindes yang ada di setiap desa belum efektif dimanfaatkan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Dimana polindes

yang seharusnya menjadi tempat pelayanan kesehatan masyarakat, namun yang terjadi selama ini bangunan tersebut tidak dimanfaatkan. Untuk itu, agar aset di kecamatan batudaa pantai dapat dimanfaatkan dengan baik, maka sangat diharapkan adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi antara aparatur ditingkat kecamatan, aparatur ditingkat desa dan pemerintah Kabupaten.

Pemeliharaan

Pemeliharaan dalam penelitian ini adalah aktivitas untuk mempertahankan kondisi aset sesuai fungsi dan tujuannya. Dimana aset akan berfungsi sebagaimana mestinya apabila sumber daya manusia mampu memelihara aset secara layak dan rutin. Pemeliharaan rutin dapat dilakukan secara berkala. Menurut Sugiana (2013:240) pemeliharaan aset adalah “sekumpulan aktivitas yang diorganisasikan untuk menjamin agar aset dapat dioperasikan dalam kondisi terbaik dengan biaya terendah. Selanjutnya Duffua (2014:132) mendefinisikan pemeliharaan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan peralatan atau sistem kedalam kondisi awal. Pemeliharaan juga merupakan kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Untuk Pengertian Pemeliharaan lebih jelas adalah tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan memperbaharui umur masa pakai dan kegagalan/kerusakan mesin. (Setiawan F.D, 2016).

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah dalam menunjang pelayanan publik yang dilihat dari aspek pemeliharaan masih kurang. Hal ini terjadi karena biaya atau anggaran untuk pemeliharaan aset yang ada kadang-kadang digunakan atau dipakai pembelian ATK, karena biaya/anggaran pemeliharaan aset tergabung dengan biaya ATK. Kondisi ini yang menyebabkan pemeliharaan aset, seringkali terlambat dan kurang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga berdampak terhadap aset atau barang-barang yang digunakan, dan dengan sendirinya berpengaruh juga pada pelayanan publik.

Pengawasan

Pengawasan dalam penelitian adalah suatu proses pengendalian atau pemberian instruksi terhadap kegiatan pekerjaan termasuk dalam

pemanfaatan aset daerah untuk menunjang pelayanan publik. Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Siagian (2015:25) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah dalam menunjang pelayanan publik yang dilihat dari aspek pengawasan belum efektif. Hal ini terjadi karena kecamatan batudaa pantai agak jauh dari ibukota Kabupaten, selain itu wilayahnya cukup terjal atau melewati tanjakan serta jalan yang rusak, demikian pula jalan menuju desa di Kecamatan Batudaa Pantai. Sehingga kondisi ini menjadi tantangan bagi seorang camat yang ditempatkan di Kecamatan Batudaa Pantai. Dari kendala tersebut membuat pengawasan camat terhadap aparaturnya terlihat kurang, disebabkan camat tidak tiap hari hadir di Kantor Kecamatan, demikian juga pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah yang ada di Kecamatan khususnya pemanfaatan aset di Kantor Camat Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Dilihat dari aspek koordinasi masih kurang, karena pemanfaatan gedung puskesmas pembantu atau polindes yang ada di setiap desa belum efektif dimanfaatkan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Dimana polindes yang seharusnya menjadi tempat pelayanan kesehatan masyarakat, namun yang terjadi selama ini bangunan tersebut tidak dimanfaatkan, disebabkan koordinasi belum berjalan secara intensif. Dilihat dari aspek pemeliharaan masih kurang, karena biaya atau anggaran untuk pemeliharaan aset yang ada kadang-kadang digunakan atau dipakai pembelian ATK, karena biaya/anggaran pemeliharaan aset tergabung dengan biaya ATK. Kondisi ini yang menyebabkan pemeliharaan aset, seringkali terlambat dan kurang sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan. Dilihat dari aspek pengawasan belum efektif, karena kecamatan batudaa pantai agak jauh dari ibukota Kabupaten, selain itu wilayahnya cukup terjal atau melewati tanjakan serta jalan yang rusak, demikian pula jalan menuju desa di Kecamatan Batudaa Pantai. Kondisi ini menyebabkan pengawasan kurang intensif dilakukan. Secara keseluruhan temuan penelitian tentang Pemanfaatan Aset Daerah dalam Menunjang Pelayanan Publik yang dilihat dari aspek koordinasi, pemeliharaan, dan pengawasan masih kurang atau belum efektif dilakukan dalam menunjang pelayanan publik di Kantor Camat Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: Perlunya koordinasi dan komunikasi dilakukan secara kontinyu, agar pemanfaatan aset daerah lebih efektif dilakukan. Perlunya pemeliharaan aset dilakukan secara layak dan rutin atau secara berkala, agar aset atau barang-barang tersebut dapat dioperasikan dalam kondisi terbaik dengan biaya terendah. Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan aset dilakukan secara kontinyu atau berkesinambungan, agar aset yang ada dapat dikontrol dan dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. Perlunya temuan masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini seperti koordinasi yang kurang, pemeliharaan aset yang kurang, dan pengawasan yang kurang efektif dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau rekomendasi untuk perbaikan pemanfaatan aset dalam meningkatkan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, 2015. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada Universiti Prees.

Alwi, Syafarudin, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif, Edisi Pertama*, Cet. Pertama: BPFE (Fakultas ekonomi UGM).

Creswell, John W., 2015, *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed, Edisi ketiga*, Cetakan Pertama: Pustaka Belajar.

Gunawan, 2012. *Organisasi dan Manajemen dalam Menghadapi Globalisasi*. Gramedia Pustaka Ilmu.

Handyaningrat, Soewarno, 2012. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Cetak Ke Sepuluh* : CV Haji Masagung.

Handoko, T Hani., 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Keenam Belas*: BPFE UGM.

Hasibuan, Malayu S.P., 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Cetak Ke Dua Puluh*, Bumi Aksara.

Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* : UPP AMP YKPN.

Manulang., 2013. *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Kedelapan Belas* : Gajah Mada Universiti Press.

Moonir, 2013. *Kinerja Organisasi Dan Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara.

Moleong, Lexi J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetak Ketiga Puluh dua* : PT Remadja Rosdakarya.

Mulyadi, Dedy., 2015. *Administrasi Publik Untuk pelayanan Publik : Konsep dan praktik administrasi*, Alfabeta.

Nawawi, Handari, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetak Ketiga*: Gama Press.

Panggabean, 2012. *Manajemen Sumber daya manusia*. Ghalia Indonesia.

Pasolong, Harbani, 2013. *Teori Administrasi Publik. Cetak Ke-5*: Alfabeta.

Ratminto, Winarsi. 2013. *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Organisasi Pemerintah*: Binarupa Aksara.

Riduan., 2015. *Metode Dan Tehnik Menyusun Tesis, Pengantar Kata Buchari Alma, Cetak Ketiga*: Alfabeta.

Sigian, S.P, 2012. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*: Gunung Agung.

Sianipar, S.A, 2014. *Mutu Pelayanan dalam Organisasi Sektor Publik*: PT. Raja Grafindo.

Sinambela, Potiak, Lijan., 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*: Bumi Aksara.

Siregar, Doli D, 2014. *Manajemen Aset* : Bumi Aksara.

Sugiono., 2020. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* : Alfabeta.

Sumaryadi, Sosiologi, 2016. *Pemerintahan : Dari Prespektif Pelayanan Pemberdayaan ,Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana, Djameludin Tanjung , Supardan Modeong, 2014. *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta

The, Liang Gie., 2015, *Administrasi Perkantoran Modern, Cetakan Ketujuh* : Liberti

Tjiptono, Anastasia, 2013. *Manajemen Personalia*: Prenada Media Group.

Widjaya, AW. 2014. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Rajawali Press.

Winardi, 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*: Rineka Cipta

Wursanto, A.2014. *Manajemen Pelayanan Sektor Publik* : Erlangga

Yusuf, 2014. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* : Gema Insani Press Ukura.